

# Tambah Modal ke ADB, Defisit 2009 Tak Berubah

NERACA

Jakarta - Direktur Perencanaan Ekonomi Makro Bappenas, Bambang Priambodo mengatakan penambahan modal Indonesia ke Asian Development Bank (ADB) sebesar Rp 2 triliun sudah masuk di dalam defisit 2009 sebesar 2,5%.

"Tidak menambah besaran defisit," tukas Bambang kepada *Neraca* Kamis (30/4) malam. Penambahan modal dilakukan sejalan dengan kesepakatan Dewan Gubernur ADB menaikkan modal ADB hingga 200%.

Menurut Bambang, suntikan dana tersebut akan efektif jika digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan yang mempunyai prioritas yang tinggi. "Seyogyanya pinjaman luar negeri dipakai untuk kegiatan prioritas," ungkapnya.

Saat ini pinjaman Indonesia ke ADB mencapai US\$ 9,4 miliar. Sedangkan China berada di nomor urut dua sekitar US\$ 7,4 miliar dan India US\$ 5 miliar. Sementara pemegang saham terbesar ADB adalah Jepang dan AS masing-masing 15,57%. Kemudian China 6,4%, India 6,3%, Australia 5,7% dan Indonesia 5,4%. Sementara sebanyak 61 negara lainnya menguasai 54,9% saham ADB.

Namun demikian, DPR mengaku rincian tambahan modal Indonesia senilai Rp2 triliun ke ADB belum disampaikan oleh pemerintah. Dengan begitu, belum bisa dipastikan apakah dana tersebut akan masuk pada anggaran di APBN-P 2009 atau APBN 2010. Namun pada prinsipnya tambahan modal tersebut tentu membebani APBN. Apalagi saat ini APBN masih tercatat mengalami defisit.

"Itu sama sekali belum jelas, rinciannya belum disampaikan ke kita (DPR)" tandas Wakil Panitia Anggaran Harry Azhar Azis dalam perbincangan dengan *Neraca*, secara terpisah.

Harry menegaskan, adanya suntikan modal peserta ini akan tetap menambah beban ke dalam APBN. "Pemerintah yang saat ini jangan terlalu menambah beban berat ke APBN selanjutnya dengan tambahan utang," imbuhnya.

Menurut Harry, suntikan modal ini tidak akan menambah courting power Indonesia di ADB. Ppasalnya penyuntikan modal ini merata di negara-negara anggota ADB. Sehingga keputusan yang akan diambil oleh pemerintah harus berkonsultasi bersama DPR. Pasalnya jika diajukan ke DPR belum tentu DPR akan meloloskan dan menyetujuinya. "Dari sisi DPR tidak bisa memastikan diterima atau tidak itu keputusan bersama," terangnya.

Akan tetapi secara pribadi Harry setuju dengan penambahan modal tersebut. Pasalnya dalam kondisi krisis ekonomi global saat ini Indonesia harus meningkatkan power di ADB. ● *sen/arns*